

Focus Group Discussion (FGD)
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN (APHK)
WILAYAH TIMUR
dalam rangka Memperbaharui
HUKUM PERIKATAN (NON-KONTRAKTUAL)

Hotel Swiss Belinn, Tunjungan 27-28 Agustus 2018

Latar belakang

Perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Sumber perikatan lahir dari suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Adapun perikatan yang timbul dari undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan oleh hubungan kekeluargaan misalnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sedangkan untuk perikatan yang timbul dari undang sebagai akibat dari perbuatan orang terbagi menjadi perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum (*rechmatige daad*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Ketentuan mengenai Hukum Perikatan ini saat ini telah mengalami banyak perubahan sehingga perlu penyesuaian diantaranya perkembangan mengenai hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang. Perkembangan-perkembangan tersebut terkait dengan beberapa hal yang perlu untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Ketentuan perikatan yang ada saat ini adalah masih peninggalan dari zaman Belanda karena Indonesia masih mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun sudah ada beberapa ketentuan dari bidang perdata telah ada undang-undangnya. Pada saat ini APHK sedang mencoba untuk memperbaharui peraturan dibidang Hukum Perdata, yang salah satunya mengenai Hukum Perikatan (Non-Kontraktual). Untuk itulah diperlukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk FGD nasional ini sehingga dapat dirumuskan langkah bersama elemen bangsa untuk mencapai peraturan di bidang Hukum Perdata.

Tujuan

Tujuan FGD ini adalah untuk melakukan identifikasi dan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru, khususnya Bab tentang perikatan yang lahir bukan dari perjanjian (non-kontraktual) dengan meninjau perkembangan gagasan dan kajian hukum perikatan (non-kontraktual) yang berkembang dimasyarakat sehingga dapat memberikan masukan bagi draft peraturan perundang-undangan Hukum Perikatan (Non-Kontraktual) yang baru.

Peserta

Peserta yang diharapkan terlibat dalam konferensi ini adalah dosen anggota APHK.

Metode Penyelenggaraan

Kegiatan ini meliputi:

FGD yang akan diikuti peserta dari dosen anggota APHK khususnya wilayah Timur yang dipandu oleh para Guru Besar dan terbagi dalam panel-panel/ paralel yang membahas tema-tema berikut ini:

Topik: Hukum Perikatan (Non-Kontraktual)

No.	SUB TOPIK
1.	Perikatan yang lahir dari undang-undang
2.	Perikatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (tidak melawan hukum)
3.	Onrechtmatige daad
4.	Perbuatan yang melanggar hak orang lain
5.	Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
6.	Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan
7.	Perbuatan yang mengandung unsur ketidakhati-hatian
8.	Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
9.	Pembayaran yang tidak terutang (ex Pasal 1359 BW)
10.	Unjust Enrichment
11.	Responsibility and liability (dan perkembangannya)
12.	Kerugian, ganti rugi, restitusi, penghentian sementara
13.	Misbruik van recht

Setiap tim harus mempersiapkan pokok-pokok pikiran terpenting yang harus didiskusikan untuk menjadi rumusan pasal, walaupun masih bersifat preliminary.

Waktu, Tempat dan Tahapan Pelaksanaan

FGD APHK Wilayah Timur akan diselenggarakan pada 27 - 28 Agustus 2018, di Swiss Belinn, Tunjungan, Surabaya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:

- Registrasi awal (*early bird registration*) dimulai tanggal: 30 Juni 2018 dengan mencantumkan pokok bahasan yang akan diambil. Registrasi awal dapat dilakukan melalui link <https://goo.gl/fHKWHM>.
- Kuota yang tersedia sebanyak 75 Peserta.
- Pelaksanaan : 27-28 Agustus 2018

Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan Wilayah Timur dan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.

Jadwal

Senin, 27 Agustus 2018

Selasa, 28 Agustus 2018

Pendanaan

FGD ini tidak dipungut biaya bagi Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan.

Panitia

Para Guru Besar Anggota APHK
Pengurus APHK Wilayah Timur
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura